

Fenomena *Entitlement* Pada Generasi Y dan Z: Analisis Konteks dan Tanggapan Kritis-Konstruktif

Olga Sancaya Dyah Permatasari¹

Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma

<https://doi.org/10.24071/suksma.v6i2.11604>

Naskah Masuk 31 Januari 2025 Naskah Diterima 25 Oktober 2025 Naskah Dipublikasikan 31 Oktober 2025

Abstract. Generation Y and Z are in the spotlight. One of the reasons is their tendency towards entitlement, namely expecting their personal needs to be prioritized without paying attention to and caring about the needs of others, not respecting ethics and social norms, and forgetting responsibility as part of society. However it could be the case that this entitlement attitude occurs because of a lack of proper understanding between awareness of the rights of responsible individuals and attitudes that reflect entitlement. This entitlement attitude could have its roots in liberalism and postmodernism, and was affected by technological developments, including social media. In an increasingly fluid world condition, which means there is no longer a single truth, individuals began to emphasize awareness of individual rights, appreciate the freedom to express their identity, and the value of individualism increased, as did the development of popular culture. Another factor that may be less realized so far is the role of overly involved parenting which actually makes children only understand one perspective, that they are individuals who have the right to be prioritized. The feeling of being disadvantaged or feeling wronged can serve as the background for why someone becomes entitled. This collective phenomenon needs attention, including the agents or parties and factors that are involved, and what critical and constructive responses can be given, so that we become more aware and responsible citizens in the larger society.

Keywords: *Generasi Z, Generasi Milenial, Entitlement, Hak individu, Budaya*

Korespondensi Penulis

(Olga Sancaya Dyah Permatasari, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)

Email: olga.sancayadyah@usd.ac.id

Pendahuluan

“Kids these days don’t know the value of a hard day’s work. They ask for too much, they do too little, they do not respect hierarchies, they don’t want to pay their dues, they say “like” too much, they have tattoos on their arms, they’re always looking at their phones, and they quit their jobs instead of miserably sticking it out. Snowflakes!” (Jewell, 2022).

Kutipan dari artikel yang ditulis oleh Hannah Jewell pada *The Guardian* di tahun 2022 di atas sedikit banyak mengingatkan saya pada salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi di kalangan Generasi Y dan Z yaitu fenomena *self-entitlement*. Masih berhubungan dengan topik ini, Gillespie (2014) dalam artikelnya yang ia tulis di *Times* menceritakan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Reason-Rupe Poll kepada 1000 orang dewasa Amerika yang representatif, yaitu generasi milenial yang berusia 18 hingga 29 tahun. Jajak pendapat ini mengungkapkan bahwa generasi milenial di rentang usia tersebut menilai dirinya sebagai egois dan 65% dari mereka menganggap mereka “berhak”. Generasi milenial dinilai sebagai monster kecil yang mementingkan diri sendiri yang mengharapkan dunia datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketertarikan saya sendiri pada topik ini berawal ketika memperhatikan informasi-informasi yang beredar di media sosial, juga saya terlibat dalam dinamika dengan banyak generasi muda, terutama generasi Z, serta pengamatan sehari-hari mengenai fenomena ini. Semua pengalaman ini membangkitkan keprihatinan saya terhadap bagaimana fenomena *self-entitlement* atau *entitlement* bisa terjadi (selanjutnya saya akan lebih banyak menggunakan term *entitlement*). Bentuk *entitlement* yang saya temukan adalah: pada saat mereka merasa bahwa atas nama kesejahteraan psikologis mereka, kebutuhan dan tujuan mereka harus diutamakan. Salah satu caranya adalah dengan meminta orang lain mengikuti jadwal mereka, sedangkan para muda mudi ini sedang meminta tolong kepada narasumber yang bersangkutan untuk tugas-tugas mereka. Mereka juga menuntut untuk meminimalisir pekerjaan atau tugas yang ada, tetapi juga tetap mengharapkan hasil yang maksimal. Mereka biasanya menuntut untuk diberikan tugas yang lebih mudah dengan tenggat waktu yang lebih panjang. Hal ini juga terjadi ketika mereka meminta teman atau pasangannya untuk memahami perasaan mereka dan bersikap hati-hati dengan alasan bahwa mereka memiliki masalah psikologis. Beberapa potongan peristiwa di atas menunjukkan adanya kurang-pekaan terhadap kebutuhan dan kondisi orang lain dan para muda-mudi ini lebih mementingkan kebutuhan maupun tujuannya sendiri. Dalam interaksi dengan mereka, seringkali kurang ada proses dialogis dan juga kompromi yang terjadi.

Perlu ditegaskan bahwa fenomena *entitlement* tentu sudah tidak asing, berbagai penelitian mengenai Generasi Y dan Z yang *entitled* di dalam konteks kerja, keagamaan, karakteristik, hubungan antara motivasi dan *entitlement*, maupun hubungan *entitlement* dengan media sosial, dan lain sebagainya. Kesamaan yang saya temukan dari penelitian-penelitian ini adalah para penulis memeriksa satu-dua variabel yang memiliki korelasi dengan *entitlement*, baik itu dalam konteks positif maupun negatif. Sedangkan pembahasan mengenai faktor-faktor risiko yang berpotensi menyebabkan seseorang

menjadi *entitled* tidak dikurasi dengan memperhatikan konstelasi-konstelasi antar faktor dari kacamata lintas keilmuan. Sehingga, terkhususnya pada artikel ini, saya lebih ingin mengajak para pembaca untuk menelaah fenomena *entitlement* secara lebih kritis. Melihat secara kritis artinya *entitlement* tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan psikologis individu semata dan dampaknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil orang, tetapi dampak dari *entitlement* ini sudah memunculkan persoalan-persoalan sosial serius. Artinya, perlu juga kita memahami bahwa fenomena *entitlement* ini ternyata bertumbuh seiring perubahan pada sosial-budaya masyarakat secara global dan bukan sekedar karena disebabkan oleh persoalan-persoalan klinis semata.

Sehingga, tujuan dari artikel ini adalah kembali meninjau dan memahami fenomena *entitlement* sebagai fenomena yang bertumbuh, tidak lagi hanya dilihat dari perspektif psikologi klinis tetapi juga turut dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, serta bagaimana fenomena *entitlement* yang dialami secara global juga memberikan persoalan sosial yang berkenaan dengan sikap-sikap mengedepankan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Generasi yang lebih muda kini cenderung mengutamakan "apa yang mereka rasa sebagai hak mereka" tetapi kurang memperhatikan fakta bahwa sebagai bagian dari masyarakat, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memahami dan memenuhi kewajiban dan kebutuhan lingkungan sosial, serta untuk menghormati etika dan norma sosial. Selain itu, kita sendiri sangat dimungkinkan menjadi kontributor yang memperkuat faktor resiko dimana suatu generasi Y dan Z (dan mungkin Generasi Alpha dan generasi seterusnya) menjadi generasi yang *entitled*. Maka kesadaran bersama yang lebih kritis dapat membawa perubahan positif di masa mendatang.

Dalam tulisan ini, pertama-pertama, saya akan mengajak Anda untuk kembali pada definisi dan faktor-faktor generik penyebab *entitlement* yang dilihat dari perspektif psikologi klinis dan Perkembangan. Kemudian, bergerak pada faktor-faktor lain yang bersifat lebih kultural, sebab manusia menjadi dirinya tidak hanya dipengaruhi oleh trait, pola asuh, dan proses-proses psikologis tetapi juga dibentuk oleh proses sosial dan budaya—pada bagian ini juga disertakan argumen-argumen penulis mengenai dinamika faktor dan bagaimana *entitlement* berkembang. Perbedaan *entitlement* yang lebih sehat dan faktor-faktor apa saja untuk membangunnya dan refleksi sebagai penutup pada tulisan ini. Fenomena ini perlu mendapat perhatian secara serius untuk kepentingan bersama (*common good*) yang lebih besar demi membangun keadaan yang lebih seimbang dan sehat.

Pembahasan

Pengertian dan Definisi

Fenomena *self-entitlement* atau *entitlement* yang telah menjadi topik diskursus yang lebih luas tentu tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di luar negeri. Fisk (2010); Twenge dan Foster (2008) memperhatikan fenomena *self-entitlement* di negara-negara Barat, di mana generasi yang lebih muda memiliki gejala yang sama, yaitu menginginkan agar kebutuhannya terpenuhi tanpa memberikan usaha

yang sepadan. Twenge dan Campbell (2009) mendefinisikan istilah *self-entitlement* ini sebagai keyakinan bahwa seseorang layak mendapatkan perlakuan atau manfaat khusus tanpa harus melakukan banyak upaya. *Self-entitlement* juga meliputi perasaan yang meluas bahwa saya layak mendapatkan lebih banyak daripada yang orang lain dapatkan (Campbell et al., 2004). Demikian pula, sebagaimana didefinisikan oleh *American Psychiatric Association* (2013), *sense of entitlement* adalah "harapan yang tidak masuk akal akan perlakuan yang sangat baik atau kepatuhan otomatis terhadap harapan seseorang, yang berasosiasi dengan *Narcissistic Personality Disorder* atau NPD. Dengan demikian, *self-entitlement* atau *entitlement* terkait erat dengan narsisme, ketika seseorang percaya bahwa dirinya layak dan berhak menerima perawatan atau manfaat atau penghargaan tanpa upaya yang sepadan. *Self-entitlement* dalam konteks narsisme menjadi salah satu ciri utama *grandiose narcissism*, yakni ketika individu menunjukkan rasa percaya diri yang berlebihan, kurangnya empati, dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama (Twenge & Campbell, 2009; Miller et al., 2012).

Terdapat beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang menjadi *entitled* atau mengalami *entitlement*. Ada perspektif psikologi klinis dan psikologi perkembangan yang saling memengaruhi. Pertama-tama, dalam perspektif psikologi klinis, faktor resiko ini berhubungan dengan latar belakang etiologi, yaitu: pola asuh yang sulit dan pengalaman *traumatic childhood*; *psychological distress*; dan komorbid dengan gangguan kepribadian tertentu (Miller, 2011; 2010). Selanjutnya, pola asuh keluarga menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi pada kecenderungan *entitlement* pada seseorang. Kontrol orang tua berasosiatif positif terhadap psikologis *entitlement* anak dan juga rendahnya *self-efficacy*. Begitu juga dengan perilaku orang tua yang *over-involved*, seperti memberikan tuntutan kepada anak terus menerus, selalu menyediakan berbagai kebutuhan anak, dan memberikan nasihat yang dimotivasi untuk melindungi anak dari berbagai permasalahan dan bahaya. Namun jika tidak disertai dengan ukuran yang proporsional antara menyediakan kesempatan dan membiarkan anak untuk berusaha sendiri dan belajar dari masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan tugas perkembangannya, *self-efficacy* dan kemandirian di dalam diri anak dapat kurang berkembang (Givertz & Segrin, 2014).

Kecemasan orang tua akan keselamatan anak seringkali mendorong perilaku orang tua untuk berusaha menjauhkan anak dari hal-hal yang akan melukai anak atau membuat anak menderita. Perasaan dan sikap orang tua yang protektif pada anaknya merupakan sebuah hal yang wajar karena dimotivasi oleh perasaan cinta yang besar, tetapi jika kadar sikap ini menjadi tidak proporsional, anak dapat bertumbuh menjadi pribadi dengan rasa ketidakberdayaan untuk berhadapan dengan dunia nyata dan dengan perasaan *entitlement* yang lebih kuat. Lembke (2021) menjelaskan pengamatannya bahwa di masa sekarang, banyak orang tua yang terlalu takut untuk mengambil sikap atau mengatakan sesuatu karena ketakutan perkataan ataupun sikapnya dapat meninggalkan bekas luka emosional yang berdampak pada penderitaan dan penyakit mental di masa mendatang dalam diri si anak. Orang tua

dengan kekhawatirannya melindungi anak dari kesulitan atau *adversity*, sedangkan *adversity* sebenarnya memiliki peran penting pada tumbuhnya rasa percaya diri anak untuk mampu menghadapi persoalan dan menghadapi kompleksitas dunia nyata. Sebaliknya, orang tua yang berusaha terus menerus meningkatkan harga diri anak-anak mereka dengan pujian palsu dan menjauhkan anak dari *adversity*, justru secara nyata telah membuat anak-anak ini bertumbuh menjadi seorang yang kurang toleran, lebih merasa berhak (*entitled*), dan tidak menyadari kekurangan karakter mereka sendiri.

Masih dalam perspektif psikologi klinis, hal lain yang mendorong seseorang merasa *entitled* adalah ketika ia memiliki perasaan "*feeling wronged*" atau merasa diperlakukan tidak adil. *Feeling wronged* mengacu pada persepsi bahwa seseorang telah diperlakukan tidak adil atau tidak sesuai dengan kenyataan, mendapatkan hasil yang berbeda atau menyimpang dari apa yang sudah diyakini bahwa pantas ia dapatkan. Kondisi ini dapat mencakup situasi di mana individu merasa tidak dihormati, merasa diperlakukan berbeda dari orang lain dalam situasi yang sama, merasa tidak menerima imbalan yang sepadan dengan usaha mereka, atau merasa tidak diberi penjelasan yang memadai atas keputusan yang diambil sehingga memengaruhi mereka (Walster, Walster, & Berscheid, 1976; Bies & Shapiro, 1987; Major, 1994; Miller, 2001). Zitek et al. (2010) menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa diperlakukan secara tidak benar dan adil (*feeling wronged*), ia akan merasakan emosi-emosi intens, seperti marah, kecewa, sedih, dan lainnya sehingga persepsi individu akan meningkat, kemudian mereka merasa berhak menghindari penderitaan lebih lanjut dan harus memperoleh hasil positif. Perasaan bahwa mereka telah menanggung kesulitan ini kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk memprioritaskan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri di atas kewajiban bersama. Rasa berhak yang meningkat ini yang kemudian membuat mereka berperilaku lebih egois.

Freud sebelumnya pernah mengungkapkan hal serupa, yaitu mengenai perilaku seseorang yang pernah menderita kemudian mengembangkan perasaan berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa karena sebelumnya ia sudah menderita. Dalam tulisannya, Freud (1916/1957 dalam Bishop & Lane, 2002) menelusuri sikap ini sebagai bagian dari "keanehan umum" yang terjadi ketika seseorang memandang peristiwa atau pengalaman menyakitkan di masa kanak-kanak sebagai cedera yang tidak adil, sehingga di dalam kemarahannya, orang tersebut memberontak terhadap ketidakadilan dan merasa dibenarkan dalam menuntut hak istimewa sebagai kompensasi.

Rasa berhak untuk diistimewakan sebagai kompensasi karena sebelumnya sudah pernah menderita, dapat dianalogikan seperti hantu yang menyelinap saat seseorang tidak sedang dalam kesadaran penuh lalu kemudian mengambil alih tubuh. Maka ketika seseorang tidak betul-betul sadar akan apa yang salah dari caranya berpikir dan merasa, ia dapat berubah menjadi seorang yang egois.

Dapat dibayangkan apabila seseorang sejak ia masih kanak-kanak mendapatkan kenyamanan secara tidak proporsional, tidak pernah menangani tantangan dan persoalan dengan upayanya sendiri, kemudian secara pribadi ia mengembangkan suatu cara berpikir yang cenderung egoistik dan mekanisme pertahanan diri yang mendukung cara berpikirnya tersebut—secara tidak disadari anak bertumbuh sebagai pribadi dengan rasa berhak yang besar.

Tulisan di atas, sebagai diskusi awal bagaimana *self-entitlement* dibicarakan dan dipahami terjadi sebagai akibat dari perspektif psikologi klinis. Tetapi, penjelasan dari perspektif tersebut kurang dapat menjelaskan secara komprehensif sehingga menjadi cukup jelas kenapa *self-entitlement* bertransformasi dari yang awal mulanya adalah persoalan individual kini menjadi gejala sosial. Oleh karena itu, maka *self-entitlement* ini perlu ditilik dari perspektif lingkungan sosial dan budaya dimana individu tinggal dan mengadopsi budaya dari luar yang turut memengaruhi. Perspektif sosial-budaya yang akan diangkat adalah posmodernisme dan nilai individualisme.

Postmodern Life dan Nilai Individualisme

Apakah persoalan *self-entitlement* pada Generasi Y dan Z, semata-mata hanya dipengaruhi oleh faktor pola asuh, *traumatic childhood*, kemudian *psychological distress* dan gangguan kepribadian? Menurut peneliti, kita juga perlu memperhatikan konteks era dan persoalan-persoalan yang ada. Generasi Y dan Z merupakan generasi yang tumbuh di era digital dan merebaknya budaya individualisme, di mana ekspresi identitas dan hak individu menjadi prioritas. Namun, darimana budaya individualisme, ekspresi identitas, dan hak individu berubah menjadi prioritas? Di sini peneliti menyinggung beberapa perspektif untuk menerangi persoalan ini, karena seseorang tidak akan berubah sendiri tanpa ada faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut bisa berwujud ideologi, sistem (sosial, politik), pasar (ekonomi), dan juga budaya. Titik tolaknya peneliti ambil dari dunia *postmodern*, dunia tempat kita hidup saat ini. Dunia *postmodern* sendiri merupakan suatu dunia yang baru yang, menurut Jacques Derrida (1976), adalah dunia dengan makna ("*meaning*") yang tidak bersifat tetap melainkan akan berbeda-beda bagi setiap orang atau kelompok sesuai dengan persepsinya dan diejawantahkan ke dalam bahasanya sendiri-sendiri yang akhirnya memperkuat kekuatan masing-masing. Kemudian, menurut Fredric Jameson (2016), zaman *postmodern* merupakan dunia yang ditandai oleh praktik-praktik komodifikasi dan budaya konsumerisme. Sedangkan Jean Baudrillard (2004) menjelaskan dunia *postmodern* sebagai dunia yang dipenuhi oleh *hyperreality*, di mana realitas dan simulasi menjadi kabur dan sulit dibedakan. Apabila kita coba cermati, posmodernisme ini memiliki karakteristik khas yang mencerminkan tren dominan dari masyarakat Barat kontemporer, seperti konsumerisme, dan budaya populer, dan melahirkan masyarakat massa yang bergerak pada budaya individualistik (Bahovec, 2015). Postmodernisme ini juga mendorong individu menjadi seorang yang individualistik. Perspektif yang seringkali disematkan pada budaya individualistik adalah mereka lebih berfokus pada "*freedom*" dan diri. Secara khusus, yang dimaksud di sini adalah pengejaran kepentingan pribadi dan pemenuhan diri sebagai tujuan utama, yang terjadi dengan membiarkan egoisme mengambil alih altruisme dan tidak berfokus pada kebaikan bagi komunitas (Gustavsson, 2008). Namun, di sisi lain, individualistik juga memiliki definisi lain yang bernuansa kultural yang kuat. Dalam pandangan Baumeister (1998) individualisme lebih menunjuk pada individu yang kuat dalam menciptakan dan mempertahankan rasa diri (*sense of Self*). Individu ini, merasa perlu untuk mengemukakan opini, menunjukkan sikap pribadi

yang unik atau khas, dan merasa puas dengan diri sendiri, serta mengedepankan rasionalitas dalam berpikir dan mengambil sikap (Oyserman & Markus, 1993; Triandis, 1995). Namun, individualisme di sisi lain juga tetap membutuhkan hubungan dengan orang lain dan menjadi anggota di dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan mereka sendiri (Oyserman, Coon, & Kimmelmeier, 2002).

Masyarakat yang tinggal di wilayah Asia termasuk Indonesia pada dasarnya hidup berdampingan dengan menerapkan budaya kolektivistik. Hofstede (2011) menyampaikan bahwa masyarakat Asia cenderung bersifat kolektivistik. Mereka lebih mementingkan keharmonisan di dalam kelompok, menghindari bahasa yang banyak menunjukkan ke-‘aku’-an dan lebih memilih “saya adalah kami” atau bagian dari masyarakat, dan mematuhi nilai-nilai tersebut sama saja menghindarkan diri dari rasa malu. Setyaningrum, Wijaya dan Subagyo (2022) dalam penelitiannya juga menggambarkan hal yang serupa, yaitu masyarakat Indonesia mementingkan keharmonisan dengan salah satu caranya menghindari konflik dalam kehidupan sehari-hari. Maka, ketika masyarakat Indonesia kini mengadopsi unsur-unsur budaya individualistik dan mengadopsinya dengan serampangan tanpa memahami esensi dan resiko, lalu menerapkannya pada lingkungan masyarakat yang secara umum ditandai oleh budaya kolektif, akan muncul friksi dan interpretasi-interpretasi negatif mengenai sikap-sikap yang mungkin pada budaya individualistik lebih dihargai karena telah menjadi bagian dari identitas diri. Dibutuhkan suatu keseimbangan antara pemahaman dan penerapan kehidupan individualistik dengan kehidupan sosial apabila kita hendak mengadopsi budaya individualistik di tengah budaya mayoritas dimana kita tinggal, yaitu kolektif.

Menurut peneliti, Zygmunt Bauman (1988) menawarkan cara pandang mengenai *postmodernisme* yang cukup relevan dengan budaya individualistik yang memiliki relasi pada topik *entitlement* ini. Bauman menjabarkan dunia *postmodern* sebagai dunia yang ditandai oleh pandangan dunia yang pluralistik, tidak dapat direduksi dan tidak dapat ditarik kembali, terbagi menjadi banyak unit yang berdaulat dan lokasi-lokasi otoritas, tanpa tatanan horizontal atau vertikal, baik dalam aktualitas maupun potensi. Ini berarti tidak ada kebenaran mutlak, sebab setiap kelompok atau unit memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Bauman (1988) memberikan contoh, di mana makna dan bentuk budaya bersifat mandiri dan berlandaskan diri sendiri (otonom), artinya tidak bergantung pada standar eksternal dan universal untuk memvalidasi keberadaan makna itu sendiri. Makna divalidasi di dalam konteks mereka sendiri. Di samping itu, masyarakat mulai mampu membuat pilihannya sendiri semenjak munculnya liberalisme, dan liberalisme menekankan pentingnya kebebasan, dan kebebasan itu sendiri dipandang sebagai aspek mendasar dari eksistensi manusia. Pengejaran kebebasan itu sendiri menurut Bauman (1996) menimbulkan suatu ketegangan di tengah masyarakat yang berdampak pada adanya ketidaksetaraan dan ketidakamanan yang lebih besar. Maka, untuk menyeimbangkannya, Bauman menegaskan bahwa kebebasan perlu diimbangi dengan rasa bertanggung jawab sebagai individu dan perannya sebagai warga masyarakat.

Singkatnya, dunia *postmodern* merupakan zaman yang ditandai oleh nilai relatif dan subjektif.

Dalam arti yang paling ekstrem, hal ini berarti tidak ada gagasan dan kebenaran tunggal, dan semua kebenaran bergantung pada budaya, sejarah, dan konteks personal. Dunia *postmodern* ini juga digambarkan sebagai dunia yang merangkul keberagaman, multiplisitas, dan narasi yang terputus-putus seperti yang tertampak pada seni dan sastra *postmodern* yang seringkali menolak gagasan koherensi atau identitas yang bersatu. Posmodernisme terkait erat juga dengan fenomena *hyperreality*, di mana media, budaya populer dan konsumerisme membentuk identitas dan realitas sosial. Posmodernisme juga erat terhubung dengan konteks dimana tanggung jawab kolektif dan kerja keras tidak ditekankan semanjak adanya liberalisme. Liberalisme mendorong individu untuk mengejar kepentingan pribadinya, yang seringkali terjadi dalam proporsi yang tidak wajar atau kelewatan sehingga berujung pada pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Ulasan singkat mengenai dunia *postmodern* ini memberi perspektif kritis bagaimana seseorang, bahkan mungkin kita sendiri telah hidup secara perlahan tetapi pasti, dengan lebih mengedepankan diri sendiri, lebih mengedepankan kebebasan pribadi, dan melupakan kepentingan atau kebutuhan bersama, serta menimbulkan ketidakadilan. Fenomena ini pada akhirnya membuka ruang di mana individu-individu menjadi lebih *entitled*.

Lebih lanjut, posmodernisme mendorong individu untuk lebih mengekspresikan identitas dan hak individunya dengan caranya sendiri-sendiri. Sebab, posmodernisme menekankan kebebasan individu dalam membentuk identitas diri dengan cara-cara yang semakin kreatif. Identitas diri di era *postmodern* ini tidak bisa lagi dinilai dalam kerangka pemikiran lama yang menilai identitas sebagai sesuatu yang tetap dan esensial, melainkan sebagai kategori yang cair, berganda (*multiple*), dan terus berubah karena dipengaruhi secara terus menerus oleh hasil dari konstruksi sosial dan historis yang kemudian senantiasa ditafsirkan ulang dan direkonstruksi.

Berpikir Ulang: Adopsi Budaya Individualistik Pada Masyarakat Budaya Kolektif

Argumen lanjutan peneliti, apakah masyarakat muda kita ini sudah mengadopsi budaya individualistik dengan bijak, termasuk beradaptasi dengan resiko dan tantangan khusus yang ditimbulkan oleh posmodernisme, seperti kebebasan untuk membentuk identitasnya dan terlepas dari nilai-nilai kultur kolektif? Menurut peneliti, mungkin saja generasi muda ini memang belum siap dan hanya menginternalisasi nilai-nilai individualistik tertentu tanpa memahami esensi dasar dari nilai individualistik tersebut, sehingga yang tampak menonjol adalah bahwa mereka lebih berfokus pada kebebasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan diri tanpa mempertimbangkan kebutuhan komunitas dan kebaikan yang lebih besar. Situasi ini kemudian menjadi faktor lain yang membentuk Generasi Y dan Z menjadi pribadi yang *entitled*. Pendapat peneliti ini mungkin belum bisa dikatakan sebagai suatu kebenaran dan belum ada kajian ilmiah yang secara spesifik dan elaboratif mendukung pendapat ini. Budaya individualistik memang sesuai dengan karakter masyarakat di Barat—yang memang terbentuk dengan nilai-nilai hidup yang mengedepankan independensi sehingga sangat bertolak belakang dengan masyarakat di Indonesia yang menerapkan budaya kolektivistik, yang mana kehidupan sehari-hari

dijalankan dengan tetap memikirkan sesama dan kebersamaan. Maksudnya setiap sikap, perilaku, dan keputusan yang diambil akan dipikirkan dengan melibatkan perhitungan kebaikan dan kerugian yang akan diterima lingkungan sosial sehingga individu akan lebih berhati-hati dalam bermasyarakat. Dengan demikian tuntutan untuk bertanggung jawab dalam bermasyarakat dengan cara-cara yang mengikuti budaya kolektivistik tetap perlu diterapkan. Jika tidak, dampaknya adalah pelemahan pada ikatan sosial yang berujung pada konflik-konflik sosial yang lebih kompleks. Sebagai contoh adalah fenomena korupsi dan nepotisme, di mana individu hanya akan memikirkan keuntungan dan pemenuhan kebutuhan pribadi tanpa merasa berdosa sebab ia merasa berhak melakukannya, sebuah sikap dan tindakan yang melemahkan ikatan sosial dan berakibat pada ketidakadilan sosial.

Oleh karenanya, agar kewarganegaraan di era posmodernisme ini tidak menimbulkan suatu persoalan sosial, sangat diperlukan etika kewargaan yang baru, yang menggabungkan keadilan, kepedulian, dan empati untuk kebaikan bersama (Ivic, 2011). Namun, ketika seseorang lupa akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat dan hanya mengedepankan hak individu dan ekspresi identitas diri, maka individu ini memiliki gejala egoisme yang tidak sesuai dengan tuntutan kewargaan dalam masyarakat modern yang demokratis.

Media Sosial sebagai Alat

Setelah membahas konstelasi kultural yang baru yang menjadi latar belakang lahirnya *self-entitlement*, kita perlu bertanya mengenai peran media sosial yang sangat kuat akhir-akhir ini sebagai bagian dari budaya posmoderen. Secara khusus, bagaimana peran media sosial memperkuat ekspresi identitas dan gejala *self-entitlement*? Pertama-tama kita ingat bahwa fenomena ekspresi identitas dan hak individu sebagai prioritas membawa individu pada pola pikir yang menekankan kemandirian yang bisa saja positif. Namun jika individu yang bersangkutan tidak menyadarinya, hal tersebut dapat juga menyebabkan mereka menjadi egois dan mengabaikan dampak tindakan mereka terhadap orang lain (Twenge & Campbell, 2009). Dalam hal ini media sosial menciptakan norma baru di mana pencapaian individu, seperti popularitas dan pengakuan, menjadi lebih penting daripada hubungan sosial yang mendalam, sementara penggunaan media sosial secara intensif terkait dengan peningkatan individualitas yang lebih mementingkan diri sendiri dan memiliki tujuan pribadi. Di sini kita melihat terjadinya pergeseran nilai dari kolektivistik menjadi individualistik, di mana individu merasa perlu untuk "mengutamakan diri sendiri" yang akhirnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan pribadi (Twenge et al., 2019).

Sebagai contoh nyata, bentuk dari perilaku untuk mendapatkan pengakuan dan popularitas juga muncul pada siswa milenial di Yogyakarta, di mana perilaku *flexing* dan *personal branding* di media sosial berkembang di antara siswa milenial ini. Hasil dari *flexing* memberikan dampak signifikan pada gaya hidup dan seringkali cara *flexing* juga dianggap tidak menyenangkan orang lain. Pada kajian ini juga ditemukan bahwa perilaku *flexing* para siswa milenial di Indonesia juga dipengaruhi oleh bagaimana tokoh atau *public figure* di media sosial melakukan *flexing* gaya hidup sehari-harinya

(Solikhah, 2023). Kebiasaan *flexing* yang dilakukan oleh oknum tertentu, dalam kasus ini sekelompok individu yang disebut sebagai “*crazy rich*”, terjadi dengan memamerkan harta kekayaan dan kehidupan pribadi dan ternyata telah menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat serta membentuk persepsi negatif terhadap para “*crazy rich*” tersebut. Masyarakat menilai perilaku para “*crazy rich*” di Indonesia sangat egois, tidak memiliki toleransi, dan tidak memiliki perasaan, serta menilai perilaku yang dilakukan tidak masuk akal karena mereka tampak merasa diri superior dibanding orang lain. Adapun partisipan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa para “*crazy rich*” menunjukkan perilaku tidak etik dan tidak manusiawi karena menggunakan orang lain untuk kepentingan pribadi (Farhan et al., 2023). Contoh di atas memberi ilustrasi bagaimana media sosial menjadi alat ekspresi diri dan mencerminkan perilaku individualistik yang dilakukan oleh orang tanpa memperhatikan akibat dari perilaku tersebut untuk orang lain dan masyarakat. Gejala sosial yang meluas seperti ini pada gilirannya akan membuat perilaku *self-entitlement* mudah berkembang dan menjadi luas diikuti banyak generasi muda. Lebih lanjutnya, melalui media sosial dan perilaku *flexing* yang dipertontonkan tersebut, suatu *mindset* terbangun, yaitu orang yang kaya dan sukses merasa lebih berhak untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang mereka sukai.

Budaya populer, Konsumerisme, dan *self-entitlement*

Menurut pandangan peneliti, melanjutkan argumen di atas—kita juga perlu lebih cermat dan kritis dalam mengamati dan memahami dinamika serta fenomena sosial yang terus berkembang dan berpeluang menjadi faktor-faktor yang mendorong individu memiliki kecenderungan ke arah *entitlement*. Fenomena khusus yang dimaksud di sini juga terkait dengan perkembangan budaya populer, yang berkembang dan terwujud dalam berbagai bentuk. Pada era posmodernisme, tidak hanya ekspresi identitas diri yang berkembang, tetapi budaya populer melalui media digital atau sosial juga bermunculan, seperti sudah peneliti bahas di atas. Di sini peneliti ingin memperlihatkan bagaimana media sosial berperan dalam memfasilitasi perkembangan budaya populer ini dengan cara-cara yang tidak selalu dapat diamati dengan mudah. Sebagai contoh, ciri budaya populer yang juga diikuti oleh banyak orang, terutama generasi Z, adalah glorifikasi atau pengagungan terhadap kesuksesan pribadi dan keluarga.

Terdapat lima penyebab utama seseorang dapat menjadi seorang narsistik, yaitu berfokus pada kekaguman diri, pola asuh yang berpusat pada anak, glorifikasi oleh selebritas yang dimediasi oleh media sosial, dan pencarian perhatian yang dimediasi oleh internet (Twenge dan Campbell, 2009). Media sosial dengan *reward system*-nya yang khas, dalam bentuk “*likes, shares, and comments*” telah menumbuhkan sebuah budaya mencari validasi. Pada saat kebutuhan untuk divalidasi tersebut tidak terpenuhi, maka muncul perasaan tidak nyaman dan adanya kecenderungan perilaku menuntut orang lain dalam interaksinya di dunia nyata agar memenuhi kebutuhannya tersebut yang ia nilai sebagai “hak”.

Jangkauan media global dapat mengarah pada adopsi nilai dan gaya hidup tertentu dan terjadilah

homogenisasi budaya. Homogenisasi budaya tidak selalu bernuansa positif, dan seringkali bertentangan dengan norma dan otoritas budaya. Homogenitas ini disebarluaskan oleh intelektual ataupun artis, kemudian diterima dan disepakati sebagai budaya kolektif oleh masyarakat. Intelektual dan artis memainkan peran penting dalam membentuk dan melegitimasi budaya pop. Sebagai contoh, Grubbs et al. (2019) dalam artikel yang mereka tulis, kehidupan selebritas erat kaitannya dengan kekayaan, hak istimewa, dan akses ke berbagai kesempatan eksklusif. Liputan media mengenai kehidupan artis ini mungkin dapat menimbulkan keyakinan bahwa seseorang berhak mendapatkan perlakuan dan hak istimewa yang sama terlepas dari pencapaian atau upaya pribadi, oleh karenanya harapan yang tidak realistis dan rasa berhak tercipta di antara individu yang menyimak liputan media tersebut secara berulang.

Lebih lanjut, Weinstein dan Aboujaoude (2015) mengeksplorasi hubungan antara penggunaan media sosial dan perasaan berhak (*entitled*) di antara pengguna. Ternyata individu yang lebih sering menggunakan media sosial cenderung mengembangkan sikap merasa berhak atas perhatian dan pengakuan, yang dapat memicu perilaku egois dan memperburuk hubungan sosial.

Media sosial bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan seseorang menjadi *entitled*. Menurut peneliti, media sosial dalam arti teknis hanyalah alat komunikasi, tetapi yang justru perlu kita cermati adalah para pelaku dan pengguna yang membuat media sosial itu menjadi sebuah dunia yang interaktif, yang membawa nilai dan keyakinan baru, dan berkekuatan untuk mengubah mentalitas dan perilaku individu dan masyarakat. Dalam konteks artikel ini, mentalitas dan perilaku yang dimaksud adalah *entitlement*. Maka, dalam bagian ini, peneliti ingin menjelaskan sedikit keterkaitan antara sistem ekonomi yang berperan membentuk budaya konsumerisme, dan media digital-sosial dan kontribusinya pada *entitlement*.

Media Sosial, *Hedonistic Lifestyle*, dan *Entitlement*

Untuk menjelaskan keterkaitan antara konsumerisme yang hadir karena sistem ekonomi dan peran media digital-sosial pada *entitlement* akan peneliti mulai dengan mengambil satu contoh fenomena yang ada di Indonesia, yaitu *hedonistic lifestyle*. Secara sekilas, kelihatannya fenomena ini terlalu jauh keterkaitannya dengan semakin banyaknya individu muda yang *entitled*. Anak muda merupakan populasi yang sangat mudah terpengaruhi oleh tekanan kelompok dan sosial karena sesuai dengan tugas perkembangan psikososial, yaitu adanya kebutuhan dari diri seorang individu yang beranjak dewasa untuk menyesuaikan diri (*fit*) dan diterima oleh kelompok. Akibatnya, mereka berusaha untuk melakukan berbagai macam cara untuk bisa diterima, termasuk mengadaptasi perilaku hedonistik.

Tayibnapis dan Tayibnapis (2020) menemukan fakta berdasarkan hasil kajiannya terhadap mahasiswa wanita di Jakarta yang mengadopsi *hedonistic lifestyle* yang tanpa disadari telah berubah menjadi suatu aturan (*rules*) dan sumber daya yang mengatur perilaku seseorang. Modernisasi telah meningkatkan tren penggunaan barang-barang *branded* di antara para mahasiswa wanita di Jakarta.

Barang *branded* yang digunakan dipersepsi sebagai alat untuk menunjukkan kelas sosial dan sebagai alat untuk dapat diterima di kelompoknya atau lingkungan sosialita. Selain itu barang *branded* juga dipersepsikan sebagai alat untuk meningkatkan harga diri dan menunjukkan superioritas di tengah pergaulan sosial. Dalam kajian ini juga dijelaskan bahwa adopsi *hedonistic lifestyle* sedikit banyak meningkatkan kecenderungan seseorang untuk menjadi *entitled* dan hanya mementingkan diri sendiri. Perilaku lain yang muncul adalah individu yang mengikuti *lifestyle* ini akan mempergunakan cara apapun, termasuk tidak berupaya keras, karena yang terpenting adalah bagaimana ia bisa mencapai tujuannya, yaitu menggunakan barang *branded* dan diterima serta diakui di lingkungan sosialnya.

Hedonistic lifestyle sebagai bagian dari budaya konsumerisme juga tidak serta merta muncul begitu saja, melainkan menjadi bagian dari ekonomi pasar. Pasar (*market*) dengan segala mekanismenya telah menjadi sistem yang mengontrol ekonomi, yang kemudian menggerakkan masyarakat dan organisasi untuk mengikuti gerak dan mekanisme tersebut (Polanyi 2002). Pola dan mekanisme pasar memiliki motifnya sendiri yang khas. Pasar yang telah mengendalikan sistem ekonomi memiliki konsekuensi yang besar bagi seluruh organisasi masyarakat. Masyarakat menjadi sekedar pelengkap pasar. Alih-alih ekonomi tertanam dalam hubungan sosial, hubungan sosial tertanam dalam sistem ekonomi. Polanyi (2002) menegaskan bahwa ketika sistem ekonomi diorganisasikan ke dalam lembaga-lembaga terpisah berdasarkan motif-motif tertentu, maka masyarakat perlu dan harus dibentuk sedemikian rupa sebagai masyarakat pasar sehingga sistem ekonomi berfungsi sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri.

Sebagian besar masyarakat kelas menengah memiliki pandangan, gaya hidup, dan harapan yang kosmopolitan dan global tetapi kemudian menjadi bagian dari masyarakat pasar dan mengadopsi budaya konsumerisme yang mencolok yang lebih mementingkan keuntungan pribadi. Bagi masyarakat kelas menengah, mode dan gaya menjadi dasar penting untuk memahami perbedaan dalam masyarakat; barang-barang kehilangan fungsi utilitasnya dan menjadi penanda identitas pribadi dan status yang membedakan individu satu dengan individu lain; mereka yang berada di luar batasan subjektif konsumsi akan terpinggirkan dan terasingkan (Mathur, 2014).

Sehubungan dengan ekonomi pasar ini, kita perlu menyadari bahwa generasi Y dan Z serta kita juga, tanpa sadar, telah menjadi bagian dari masyarakat pasar. Masalahnya, ketika sudah sadar, apakah kita akan terus menjadi bagian dari masyarakat pasar tersebut? Apakah kita akan menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh sistem ekonomi yang dibuat pasar, lalu terus menjadi “konsumen” dan tanpa sadar kita telah menjadi seseorang dengan kecenderungan *entitlement*?

Peran fenomena ketidakadilan sosial dan respons Generasi Y dan Z

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tumbuhnya fenomena *self-entitlement*, khususnya mengenai perubahan konstelasi kultural posmodernisme yang individualistik, kemudian dipertajam dengan analisis mengenai peran ekonomi pasar yang mendorong

tumbuhnya konsumerisme (*hedonistic life-style*), dan peran media sosial sebagai wahana untuk ekspresi identitas diri (termasuk *flexing*). Masih ada satu faktor lain yang ikut memperkuat kecenderungan self-entitlement, yaitu kesadaran yang tinggi terhadap fenomena ketidakadilan yang menjadi salah satu ciri Generasi X dan Y.

Seemiller & Grace (2018) mengungkapkan bahwa Generasi Y dan Z lebih peka terhadap isu sosial dan cenderung merasa berhak untuk terlibat dalam perubahan sosial, sesuatu yang dapat berkontribusi pada lahirnya sikap berhak (*self-entitled* ketika mereka merasa tidak diperlakukan secara adil. Dalam hal ini media sosial masih memegang peranan besar dan penting dalam memperkuat perasaan tersebut. Platform medsos seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan pandangan, serta berpartisipasi dalam kampanye yang mendukung keadilan sosial. Hal ini tidak hanya memberi mereka suara tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa tindakan mereka dapat memengaruhi perubahan.

Generasi Y (milenial) dan Z cenderung menuntut keadilan yang lebih besar dan tidak puas dengan solusi yang dianggap tidak memadai. Kedua generasi ini juga lahir di era yang ditandai oleh perubahan iklim, kerusuhan sosial, ketidaksetaraan, dan praktek politik yang melukai banyak orang. Hal-hal tersebut sedikit banyak mendorong generasi ini untuk berbuat sesuatu dan menyuarakan pendapat maupun melakukan aksi perubahan. Akses informasi dan pengetahuan membuat mereka belajar akan hal-hal yang dinilai sebagai tidak adil dan adil, dan belajar bagaimana hak harus diperjuangkan. Namun, ternyata tidak semua generasi Y dan Z memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk mengolah informasi yang diterima secara kritis, bijaksana dan tidak impulsif. Yang terjadi justru demikian: informasi yang dirasa memberikan validasi akan diterima sebagai kenyataan tanpa mencoba untuk mengkritisi atau berefleksi terlebih dahulu. Tentu saja hal ini merupakan sebuah ironi karena merupakan sikap tidak fair dan tidak adil, dan tidak sesuai dengan semangat membela keadilan, bukan keadilan untuk diri sendiri tetapi keadilan sosial.

Generasi Y dan Z percaya bahwa mereka berhak mendapatkan akses yang sama dan kesempatan yang adil, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Seringkali generasi ini menilai berdasarkan fakta yang ada tetapi tidak mencoba untuk mencari kebenaran melalui perbandingan data relevan lainnya. Seperti yang telah peneliti singgung di atas, seringkali emosi dan persepsi lebih berperan dalam menentukan pilihan sikap. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa rasa berhak atas diri sendiri dalam konteks ketidakadilan sosial perlu dipadukan dengan rasa kewajiban untuk menghormati etika keadilan terhadap orang lain sebagai prinsip sosial. Keadilan dan kewajaran tidak hanya berjalan satu arah. Keadilan dan kewajaran harus bersifat timbal balik, interpersonal, dan sosial: "Saya memperlakukan Anda dengan adil, dan Anda juga memperlakukan saya dengan adil dalam kerangka kebaikan bersama bagi masyarakat." Agar prinsip ini terwujud, rasa berhak atas diri sendiri harus dipadukan dengan etika sosial berupa kepedulian dan tanggung jawab.

Hak Individu dan Tanggungjawab Sosial

Fenomena rasa berhak atas diri sendiri (*self-entitlement*) di kalangan Generasi Y dan Z sebagai akibat dari kombinasi konteks dan faktor. Konteks besar yang bersifat kultural adalah munculnya posmodernisme, yang tumbuh seiring dengan matangnya sistem ekonomi pasar yang liberal yang melahirkan individualisme dan konsumerisme serta melemahnya ikatan sosial masyarakat karena individu lebih mementingkan diri, yang diperparah dengan kehadiran media sosial sebagai arena *flexing*. Sedangkan faktor-faktor khusus yang telah peneliti singgung adalah pola asuh yang *over-involved*, adopsi kultur individualistik yang berujung pada pemujaan terhadap kesuksesan pribadi dalam budaya populer, dan persepsi Generasi Y dan Z terhadap ketidakadilan sosial dalam hubungannya dengan keadilan terhadap diri mereka sendiri. Tentu masih ada faktor-faktor khusus yang lain yang bersifat kontekstual, tetapi faktor-faktor di atas telah berkontribusi pada terbentuknya sikap merasa berhak atas pengakuan dan perlakuan khusus tanpa memikul tanggung jawab timbal balik. Melalui argumen-argumen di atas, peneliti mencoba mengungkap kesalahpahaman tentang "saya" yang menyadari hak-hak individu peneliti sendiri dengan rasa berhak atas diri sendiri. Peneliti menentang apabila kesalahpahaman ini terus berlanjut dan menjadi kenyataan baru yang dinormalisasikan. Jika kita coba membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, fenomena ini akan menimbulkan lebih banyak persoalan sosial dan ketidakadilan. Selain itu, jika kita kembali lagi pada perspektif sosiokultural di Indonesia yang lebih menerapkan budaya kolektif, di mana cara-cara yang terlalu individualis-egois sering dianggap tidak baik, fenomena ini mungkin juga akan melunturkan praktik-praktik adat yang membuat masyarakat di Indonesia yang multikultural dapat hidup berdampingan. Akan muncul pula persoalan-persoalan yang lahir dari hilangnya identitas diri dan bangsa, dan persoalan lain yang lebih kompleks seperti perubahan geopolitik.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam argumen di atas, *self-entitlement* merupakan perasaan di mana seorang individu merasa berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus dan mendapatkan lebih dari yang didapatkan orang lain tanpa harus melakukan upaya tertentu. Jadi, secara mendasar *self-entitlement* berbeda dengan sikap "Saya sebagai pribadi menyadari akan hak individu milik saya." Dari perspektif psikologi, kesadaran yang otentik dan sehat terhadap hak-hak individu sebenarnya selalu melibatkan pengakuan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa mengarah pada perilaku narsistik atau *self-entitled* yang berlebihan (Trzesniewski et al., 2006). Lebih lanjut, Trzesniewski et al. (2006) menjelaskan mengenai pengertian dari kesadaran yang sehat terhadap hak-hak individu ini, yaitu ketika seseorang menyadari dan menghargai hak-haknya sebagai individu, tetapi ia tetap menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik.

Lebih lanjut, Renger dan Passini (2024) dalam penelitiannya menjelaskan dengan sangat baik bahwa kesadaran akan hak individu tidak lain dan tidak bukan merupakan asosiasi antara *self-respect* dan hak asasi manusia. Artinya, seorang individu memiliki hak yang sama dengan orang lain dan karenanya individu tersebut juga memiliki kepedulian terhadap hak asasi manusia dan hak generasi mendatang sebagai rasa tanggung jawab sosialnya. Semakin tinggi *self-respect* yang dimiliki seseorang,

maka kecenderungan untuk bertanggung jawab dengan sosial atau peduli terhadap hak orang lain menjadi lebih baik. *Social responsibility* atau tanggung jawab sosial berperan penting sebagai mediator antara *self-respect* dan sikap positif terhadap hak asasi manusia dan generasi ke depan. Lebih lanjut, *self-respect* juga terbukti menjadi prediktor perilaku asertif yang unik, di mana orang dengan *self-respect* yang tinggi lebih mungkin untuk menegaskan hak-hak mereka tanpa menjadi agresif. Sebaliknya, *psychological entitlement* terkait dengan perilaku agresif ketika hak-hak miliknya dilanggar (Renger, 2018). Dengan kata lain, sebagai individu yang juga merupakan bagian di dalam masyarakat, kita perlu menekankan pentingnya menumbuhkan perasaan *entitlement* yang seimbang di dalam masyarakat. Ketika kita sadar memiliki hak, maka realisasi hak individu akan berdiri berdampingan dengan setiap kebebasan individu. Dalam berbagai hal, pelaksanaan hak individu juga terikat dengan rasa hormat terhadap kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.

Proporsionalitas dalam pelaksanaan hak individu

Hak proporsional mengandung komponen tanggung jawab untuk memberikan kembali kepada masyarakat, sedangkan *self-entitlement* cenderung mengabaikan prinsip resiprositas dan dampak sosial (Campbell et al., 2004). Menjalankan atau melaksanakan hak individu tidak dapat dipisahkan dari *growth mindset*, di mana kerja keras, pembelajaran, dan pengembangan diri dibutuhkan ketika seseorang ingin mendapatkan apa yang diinginkannya (Dweck, 2006). Twenge (2014) menjelaskan bahwa sikap proporsional mencakup kesadaran akan konteks sosial dan kebutuhan orang lain, sehingga seseorang yang memiliki harapan yang realistis akan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain: 1) kondisi dan keterbatasan sistem yang ada; 2) hak dan kepentingan orang lain; 3) dan norma sosial yang berlaku.

Jadi, untuk mengukur apakah kesadaran hak individu secara proporsional ditekankan dalam *self-entitlement* harus dilihat adanya kesadaran akan keseimbangan hak dan kewajiban, kesadaran akan proses, dan pemahaman akan konteks sosial. Sementara orang yang merasa berhak sering kali cenderung menyalahkan faktor eksternal ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan.

Self-Compassion dan Self-Esteem, bukan Self-Entitlement

Dalam rangka membangun sikap *self-respect* dan proporsionalitas pelaksanaan hak individu untuk mengikis sikap *self-entitlement*, dalam bagian ini peneliti akan membahas pentingnya beberapa aspek di dalam diri yang meliputi: *self-respect*, *self-compassion* dan *self-esteem*, serta aspek di luar diri yaitu *social responsibility* sebagai bentuk *entitlement* yang lebih efektif dan bermanfaat. Dalam hal ini, pertama-tama harus disadari bahwa rasa *entitlement* yang berlebihan memberikan dampak negatif kepada diri sendiri maupun juga kepada lingkungan sosial. Seseorang dengan *sense of self-entitlement* yang tinggi akan cenderung memiliki resiko peningkatan stres dan kecemasan karena proses kognitif dan emosional yang intensif, dimana ia merasa memiliki hak istimewa, memiliki harapan yang berlebihan, dan persepsi ketidakadilan. Akibatnya, pada saat harapan dan perasaan berhak untuk

diistimewakan tersebut tidak terpenuhi, akan timbul suatu perasaan kecewa, ego yang terancam, dan perasaan diperlakukan tidak adil (Grubbs & Exline, 2016). Tidak hanya itu saja, memiliki *sense of self-entitlement* akan membuat seseorang memiliki permasalahan di dalam hubungan interpersonal, dalam arti bahwa ia membangun permusuhan dengan orang lain karena ia merasa sebagai target dari ketidakadilan (Grubbs & Exline, 2016). Motivasi untuk mendapatkan citra diri membuat seseorang dengan *self-entitlement* yang tinggi akan lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri di atas kebutuhan dan keinginan orang lain, yang berujung pada perilaku yang egois dan tidak etis (Moeller et al., 2009).

Sebaliknya, bentuk *entitlement* yang jauh lebih efektif dan memiliki kebermanfaatan adalah pertama-tama individu ini perlu menumbuhkan otonomi diri sembari memupuk kompetensi dengan mempelajari berbagai *skill* yang relevan baginya agar ia menjadi manusia yang berdaya (mandiri dan memiliki determinasi diri, serta rasa *self-respect* yang berkembang baik). Ketika ia berdaya, individu ini akan memberikan dampak positif bagi keterhubungan sosial (*relatedness*) yang bersifat otentik dan suportif (*social responsibility*). Ia sudah tidak lagi sibuk atau terfokus kepada diri sendiri karena sudah meraih otonomi diri (Ryan & Deci, 2000) dan tidak akan memaksakan kepentingan-kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain (*self-entitlement*). Sebab, kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal tersebut, yaitu *autonomy*, *competence*, dan *relatedness* harus terpenuhi agar manusia dapat mencapai kehidupan dengan *well-being* dan kesehatan mental yang baik (Ryan & Deci, 2000).

Aspek berikutnya adalah *self-compassion*. *Self-compassion* dinilai lebih efektif dan bermanfaat karena berasosiasi dengan perasaan optimis, kebahagiaan, asertivitas, dan keterhubungan (Neff, 2009). Memiliki *self-compassion* membantu individu untuk membangun harga diri yang sehat, dan mengurangi secara signifikan ego yang defensif atau narsis (Leary et al., 2007). Melalui *self-compassion* seseorang akan lebih sadar akan perilaku tidak adil yang dilakukan secara sosial, kesadaran diri di depan umum, perenungan diri, kemarahan, dan pikiran yang kurang terbuka, sehingga ia menjadi lebih mampu untuk bernegosiasi dan menetapkan batasan secara personal maupun profesional (Neff & McGehee, 2010). Tidak hanya *self-compassion*, tetapi *self-esteem* yang optimal dapat memberikan perasaan harga diri yang lebih sehat dan bukan perasaan berhak semata. *Self-esteem* yang optimal membentuk harga diri yang tulus, stabil, dan tidak selalu memerlukan validasi atau superioritas terus menerus atas orang lain. Pada gilirannya individu ini akan merasa puas dengan berada pada level yang sama dengan orang lain dan tidak mengukur harga diri sendiri dengan mengalahkan orang lain (Kernis, 2003). Dengan kata lain, seseorang dengan *entitlement* dalam bentuk yang lebih positif berupa *self-compassion* dan *optimal self-esteem* akan mendorong seseorang tersebut untuk menjadi pribadi yang tahu di mana batas ia melindungi dirinya, lebih empatik dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.

Kesimpulan

Self-entitlement atau *entitlement* merupakan sebuah sikap, perilaku, keyakinan, dan budaya, yang telah terbentuk melalui serangkaian proses yang kompleks, lewat pelbagai gerakan dan fenomena sosial dan budaya yang sudah ada dimulai sejak 1960-an sampai sekarang. Dalam artikel ini peneliti telah mengidentifikasi dan membahas fenomena rasa berhak atas diri sendiri (*entitlement/self-entitlement*) di kalangan Generasi Y dan Z sebagai sebuah fenomena yang muncul sebagai akibat dari kombinasi pelbagai konteks dan faktor. Konteks besar yang bersifat kultural adalah budaya kolektivistik yang sudah menjadi *way of life* masyarakat di Indonesia, kemunculan posmodernisme, yang tumbuh seiring dengan matangnya sistem ekonomi pasar yang liberal yang melahirkan individualisme dan konsumerisme serta melemahnya ikatan sosial masyarakat, sebuah proses yang diperparah dengan kehadiran media sosial sebagai arena *flexing*. Adapun faktor-faktor khusus yang coba peneliti singgung, meliputi pola asuh yang *over-involved*, pemujaan terhadap kesuksesan pribadi dalam budaya populer, dan persepsi mereka terhadap ketidakadilan sosial dalam hubungannya dengan keadilan terhadap diri mereka sendiri.

Dalam artikel ini, peneliti menawarkan sebuah analisis kritis terhadap fenomena tersebut dengan menghubungkannya dengan kewajiban sosial individu sebagai bagian dari masyarakat. Dalam pandangan peneliti, bersikap kritis terhadap faktor-faktor tersebut dapat menjadi upaya konstruktif untuk menumbuhkan-kembangkan generasi-generasi seterusnya agar menjadi generasi yang lebih mampu menerapkan sikap *entitled* yang lebih proporsional dan sehat. Karena itu, artikel ini tidak hanya berhenti pada analisis konteks dan kritis terhadap fenomena *entitlement* yang sedang terjadi, tetapi ini juga hendak mengajak kita mulai mengambil sikap kritis dan konstruktif. Dalam hal ini peneliti menawarkan beberapa gagasan sebagai tanggapan yang mungkin bisa membantu meningkatkan kesadaran individu untuk mengurangi sikap *entitlement* dan memperkuat kesadaran sosial, yaitu *self-respect*, *self-compassion*, dan *self-esteem*, serta *social responsibility*.

Tentu saja setiap individu tetap dan harus dapat mempertahankan hak individu mereka. Namun, sebagai bagian dari masyarakat, terutama masyarakat yang ditandai oleh budaya kolektivistik, mereka harus memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab, dan menunjukkan perilaku timbal balik yang sesuai. Memahami bahwa ada norma sosial yang berlaku dan orang lain juga memiliki kebutuhan dan sama-sama memiliki hak istimewa. Menekankan kerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan. Maka seseorang yang masih memegang kuat rasa tanggung jawab sebagai warga masyarakat (*citizens*), apapun zamannya, ideologi yang berkembang, sistem yang sedang bekerja, hegemoni yang dominan, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, ia tidak akan mudah kehilangan komitmen untuk menjadi manusia atau warga yang bertanggung jawab dan peduli dengan kebutuhan orang lain dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Kesadaran inilah yang akan membawa kita kepada masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak egois. Sebaliknya, sikap berhak terhadap diri sendiri akan membawa kita ke masyarakat narsistik yang

tidak akan menguntungkan semua orang dalam jangka panjang. Untuk menjadi peka dan bertanggung jawab, diperlukan kesadaran untuk selalu memupuk rasa hormat dan welas asih kepada orang lain, peduli pada kepentingan umum, dan memupuk harga diri yang sehat dan optimal dengan bersikap lebih otentik, tulus, dan penuh kesadaran. Kita semua mendambakan terwujudnya masyarakat demokrasi yang sehat, namun agar masyarakat demokrasi dapat berjalan dengan baik, kita memerlukan warga negara yang cakap dan bertanggung jawab, yang memiliki nilai-nilai kewargaan, termasuk kesadaran akan keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan orang lain, serta kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga artikel ini dapat mendorong kita semua untuk lebih peka terhadap faktor-faktor kompleks yang berkontribusi pada pembentukan karakter generasi yang *entitled*—sehingga kita bisa lebih tegas dan bijaksana dalam bermasyarakat. Melalui artikel ini, semoga juga bisa mendorong pemangku kebijakan, berbagai lembaga, termasuk lembaga pendidikan untuk melakukan upaya preventif dan kuratif secara simultan pada sikap *entitlement*.

Ucapan terima kasih: Ucapan terima kasih ditujukan kepada kita semua, para ahli, peneliti, masyarakat awam, orang tua, dan semua yang membaca artikel ini yang berkontribusi pada penulisan gagasan ilmiah.

Pendanaan: Penelitian ini mempergunakan dana pribadi.

Konflik kepentingan: Penulisan artikel ini tidak memiliki konflik kepentingan baik itu secara keuangan, profesional, maupun hubungan pribadi terkait pekerjaan.

Daftar Acuan

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Bahovec, I. (2015). Christianity in confrontation with individualism and crisis of Western culture: person, community, dialog, reflexivity, and relationship ethics. *Bogoslovni vestnik*, 75(2), 335-346.
- Baudrillard, J. (2004). *Simulacra and simulation*. University of Michigan Press. USA.
- Bauman, Z. (1988). Sociology and postmodernity. *The Sociological Review*, 36(4), 790-813. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1988.tb00708.x>
- Bauman, Z. (1996). On communitarians and human freedom: or, how to square the circle. *Theory, Culture & Society*, 13(2), 79-90. <https://doi.org/10.1177/026327696013002006>
- Baumeister, R. (1998). The self. In D. Gilbert, S. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *Handbook of social*

- psychology (Vol. 1, pp. 680–740). New York: Oxford University Press.
- Bies, R. J., & Shapiro, D. L. (1987). Interactional fairness judgments: The influence of causal accounts. *Social justice research*, 1, 199–218.
- Bishop, J., & Lane, R. C. (2002). The dynamics and dangers of entitlement. *Psychoanalytic Psychology*, 19(4), 739.
- Campbell, W. K., Bonacci, A. M., Shelton, J., Exline, J. J., & Bushman, B. J. (2004). Psychological entitlement: Interpersonal consequences and validation of a self-report measure. *Journal of personality assessment*, 83(1), 29–45. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8301_04
- Derrida, J. (2016). *Of grammatology*. Jhu Press.
- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. Random house.
- Farhan, M. R., Nggaibo, M. I., Siregar, S. R., Afriansyah, I., & Kusumaningrum, F. A. (2023, May). Narcissism on Social Media: Examining Public Perceptions of Crazy Rich Flexing in Indonesia. In *International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)* (pp. 318–326). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_36
- Fisk, G. M. (2010). “I want it all and I want it now!” An examination of the etiology, expression, and escalation of excessive employee entitlement. *Human Resource Management Review*, 20(2), 102–114. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.11.001>
- Gillespie, N. (2014, August 21). Millennials Are Selfish and Entitled, and Helicopter Parents Are to Blame. *TIME*. <https://time.com/3154186/millennials-selfish-entitled-helicopter-parenting/>
- Givertz, M., & Segrin, C. (2014). The association between overinvolved parenting and young adults' self-efficacy, psychological entitlement, and family communication. *Communication Research*, 41(8), 1111–1136. <https://doi.org/10.1177/0093650212456392>
- Grubbs, J. B., & Exline, J. J. (2016). Trait entitlement: A cognitive-personality source of vulnerability to psychological distress. *Psychological bulletin*, 142(11), 1204. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/bul0000063>
- Grubbs, J. B., Exline, J. J., McCain, J., Campbell, W. K., & Twenge, J. M. (2019). Emerging adult reactions to labeling regarding age-group differences in narcissism and entitlement. *PloS one*, 14(5), e0215637. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215637>
- Gustavsson, Gina. (2008). *What Individualism Is and Is not: Or the ideals of Pippi Longstocking and Lisa Simpson*. Workshop paper to be presented at the NOPSA Conference 2008, Tromsø, Norway. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:54576/FULLTEXT01.pdf>
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1). <https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014>
- Ivic, S. (2011). The postmodern liberal concept of citizenship. In *Citizens of the World* (pp. 1–18). Brill. https://doi.org/10.1163/9789042032569_002
- Jameson, F. (2016). Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. In *Postmodernism*. Routledge.

- Jewell, H. (2022, January 28). Gen Z workers should be proud of being 'snowflakes' rather than martyrs. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/27/gen-z-workers-snowflakes-bad-treatment-bad-pay>
- Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. *Psychological inquiry*, 14(1), 1-26. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1401_01
- Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. *Journal of personality and social psychology*, 92(5), 887.
- Lembke, A. (2021). *Dopamine nation: Finding balance in the age of indulgence*. Penguin.
- Major, B. (1994). From social inequality to personal entitlement: The role of social comparisons, legitimacy appraisals, and group membership. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 26, pp. 293-355). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60156-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60156-2)
- Mathur, N. (2014). Modernity, consumer culture and construction of urban youth identity in India: A disembedding perspective. *Consumer culture, modernity and identity*, 89-121.
- Miller, D. T. (2001). Disrespect and the experience of injustice. *Annual review of psychology*, 52(1), 527-553. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.527>
- Miller, J. D., Dir, A., Gentile, B., Wilson, L., Pryor, L. R., & Campbell, W. K. (2010). Searching for a vulnerable dark triad: Comparing factor 2 psychopathy, vulnerable narcissism, and borderline personality disorder. *Journal of personality*, 78(5), 1529-1564. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2010.00660.x>
- Miller, J. D., Hoffman, B. J., Gaughan, E. T., Gentile, B., Maples, J., & Keith Campbell, W. (2011). Grandiose and vulnerable narcissism: A nomological network analysis. *Journal of personality*, 79(5), 1013-1042. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2010.00711.x>
- Miller, J. D., Price, J., Gentile, B., Lynam, D. R., & Campbell, W. K. (2012). Grandiose and vulnerable narcissism from the perspective of the interpersonal circumplex. *Personality and individual differences*, 53(4), 507-512. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.04.026>
- Moeller, S. J., Crocker, J., & Bushman, B. J. (2009). Creating hostility and conflict: Effects of entitlement and self-image goals. *Journal of experimental social psychology*, 45(2), 448-452. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2008.11.005>
- Neff, K. D. (2009). Self-compassion. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), *Handbook of individual differences in social behavior* (pp. 561-573). New York: Guilford Press.
- Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. *Self and identity*, 9(3), 225-240. <https://doi.org/10.1080/15298860902979307>
- Oyserman, D. (1993). The lens of personhood: Viewing the self and others in a multicultural society. *Journal of personality and social psychology*, 65(5), 993.

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/89930/oyserman_1993.pdf?sequence=1

- Oyserman, D., & Markus, H. R. (2014). The sociocultural self. In *Psychological Perspectives on the Self*, (Vol. 4, pp. 187-220). Psychology Press.
- Oyserman, D., Coon, H. M., & Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. *Psychological bulletin*, 128(1), 3. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11843547/>
- Polanyi, K. (2002). The great transformation. *Readings in economic sociology*, 59-60.
- Renger, D. (2018). Believing in one's equal rights: Self-respect as a predictor of assertiveness. *Self and Identity*, 17(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/15298868.2017.1313307>
- Renger, D., & Passini, S. (2024). Self-respect and responsibility: Understanding individuals' entitlement beliefs and their association with concern for others' rights. *Personality and Individual Differences*, 221, 112549. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2024.112549>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American psychologist*, 55(1), 68.
- Seemiller, C., & Grace, M. (2017). Generation Z: Educating and Engaging the Next Generation of Students. *About Campus*, 22(3), 21-26. <https://doi.org/10.1002/abc.21293>
- Setyaningrum, R., Wijaya, A. R., & Subagyo, S. (2022). The characteristics of society in Indonesian based on the Hofstede cultural dimensions: Measuring the five Indonesian island. *International Journal of Culture and Art Studies*, 6(1), 60-74. <https://talenta.usu.ac.id/ijcas/article/download/8720/4964>
- Solikhah, P. (2023). The effect of flexing and personal branding on social media on the lifestyle of millennial Islamic students in Yogyakarta Indonesia. *Nusantara Islamic Economic Journal*, 2(1), 54-65. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v2i1.567>
- Tayibnapi, A. Z., & Tayibnapi, R. G. (2020). Modernity in Hedonic Life Youth Women (Structure of Socialite Groups Among College Students in Jakarta). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1), 761-769. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1377>
- Triandis, H. C. (2001). Individualism-collectivism and personality. *Journal of personality*, 69(6), 907-924. <https://doi.org/10.1111/1467-6494.696169>
- Trzesniewski, K. H., Donnellan, M. B., & Robins, R. W. (2008). Do today's young people really think they are so extraordinary? An examination of secular trends in narcissism and self-enhancement. *Psychological Science*, 19(2), 181-188. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02065.x>
- Twenge, J. M. (2014). *Generation me-revised and updated: Why today's young Americans are more confident, assertive, entitled--and more miserable than ever before*. Simon and Schuster.
- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2009). *The narcissism epidemic: Living in the age of entitlement*. Simon and Schuster.

- Twenge, J. M., & Foster, J. D. (2008). Mapping the scale of the narcissism epidemic: increases in narcissism 2002-2007 within ethnic groups. *Journal of Research in Personality*, 42(6), 1619–1622. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2008.06.014>
- Twenge, J. M., Martin, G. N., & Spitzberg, B. H. (2019). Trends in US Adolescents' media use, 1976–2016: The rise of digital media, the decline of TV, and the (near) demise of print. *Psychology of Popular Media Culture*, 8(4), 329.
- Walster, E., Berscheid, E., & Walster, G. W. (1976). *New directions in equity research*. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 9, pp. 1-42). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60057-X](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60057-X)
- Aboujaoude, E., & Starcevic, V. (Eds.). (2015). *Mental health in the digital age: Grave dangers, great promise*. Oxford University Press.
- Zitek, E. M., Jordan, A. H., Monin, B., & Leach, F. R. (2010). Victim entitlement to behave selfishly. *Journal of personality and social psychology*, 98(2), 245. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0017168>